

# **PERJANJIAN KINERJA**

**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I**  
**TAHUN 2022**



**ESELON II**  
**INSPEKTUR WILAYAH IV BADAN PENGAWASAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugiyanto, S.H

Jabatan : Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Inspektur Wilayah II  
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
Sugiyanto, S.H

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 INSPEKTUR WILAYAH II BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp1.914.867.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan manajemen peradilan dan administrasi umum	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	40 LHP		Rp1.264.500.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	20 LHP		Rp 726.600.000
	Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	1 LHP		Rp 30.436.000
	Jumlah Satuan Kerja yang dilakukan pemeriksaan keuangan	2 LHP		Rp 41.808.000
	Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	4 LHP		Rp 146.196.000
	Peningkatan Zona Integritas	56 LHP		Rp2.206.874.000
	Pemeriksaan Probitas	10 Kegiatan		Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya
	Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	1 Kegiatan		Rp 535.180.000

Jumlah Anggaran : **Rp7.150.709.000** ,-

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan